

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10  
TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
DI SERDANG BEDAGAI**

**TUGAS AKHIR**

**OLEH:**

**ERISKA SUMITA**

**(NPM: 2103100046)**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : ERISKA SUMITA  
NPM : 2103100046  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025  
Waktu : Pukul 08.30 s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos., M.Si (.....)

PENGUJI II : Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. (.....)

PENGUJI III : Ida Martinelli, S.H., M.M. (.....)



**PANITIA PENGUJI**

Ketua

Sekretaris



Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP      Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhiani., S.Sos., M.I.Kom



**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : ERISKA SUMITA  
NPM : 2103100046  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR.  
10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA  
ROKOK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Medan, 11 Juli 2025

**Pembimbing**



**Ida Martinelli, S.H., M.M.**  
NIDN: 008036402

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**



**Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP.**  
NIDN: 0122118801  
**Dekan**



**Assoc. Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP**  
NIDN: 0080017402

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Eriska Sumita, NPM 2103100046, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 28 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Eriska Sumita

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah puji syukur penulis penjatkan atas kehadiran Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai”**, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Dengan demikian penulis berharap nantinya dari tugas akhir penulis ini dapat menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kebijakan-kebijakan kedepannya di bidang Ilmu dan pengetahuan dan juga merupakan bahan pertimbangan untuk dapat selesai melaksanakan Pendidikan Strata – 1 (SI) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terimakasih terdalam penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Julpahri dan Ibunda Elfi Zahara yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta negara. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini, serta dukungan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.SP. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli, S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan informasi dan motivasi kepada penulis.
9. Pegawai Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Narasumber Kantor Dinas Kesehatan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Kakak saya Fitriya Ningsih dan Abang Ipar saya Ardi Astanto yang telah banyak membantu dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
12. Abang saya Ricy Riyansah dan Kakak Ipar saya Sutarni Koto yang juga turut meluangkan waktu membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan penulis Aprilisia Aini dan Elfi Rahmayanti yang selalu bersedia menemani dan membantu hingga akhir perjuangan kuliah di kampus dan kepada seluruh teman-teman saya Bela Syafitri, Lutvia Hasibuan, Hanifa Permata Sari yang juga turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada adik saya Zahra Nazufa, tercinta, tercantik, terluca, tersayang, terimut, terimakasih sudah banyak membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman SMA, Lauria, Hariati, Ricka, Rani, Yolanda, Novita, Stefani, Miaju dan Siti yang selalu memberikan motivasi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Terkhusus Syah Dita Salwa, sudah menjadi teman terbaik selama masa perkuliahan, apapun yang kamu alami saat ini semoga Allah selalu meringankan setiap langkahmu.

17. Terima kasih kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 23Juni 2025

Penulis

Eriska Sumita

2103100046

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SERDANG  
BEDAGAI**

**ERISKA SUMITA**

**NPM: 2103100046**

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menegaskan larangan merokok di fasilitas yang sudah diatur dalam Perda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Perda KTR di Kabupaten Serdang Bedagai dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat berjalannya implementasi perda KTR di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau keadaan secara mendalam. Teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder. Informan penelitian terdiri dari 4 orang, yaitu 1 orang petugas Dinas Kesehatan, 2 orang Guru, dan 1 orang petugas di puskesmas Desa Payabagas, Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa implementasi Perda KTR di Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup efektif namun belum optimal sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perokok yang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda KTR, dan lemahnya penegakan hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Perda KTR di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kurangnya kesadaran masyarakat, Lemahnya penegakan hukum, Petugas Dinas Kesehatan masih belum tegas dalam menegakkan Perda KTR, dan Kurangnya sarana dan prasarana. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan implementasi Perda KTR di Kabupaten Serdang Bedagai dapat lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua penumpang.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok,*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pembatasan Masalah .....	4
1.3. Rumusan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b> .....	<b>7</b>
<b>URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>7</b>
2.1. Implementasi .....	7
2.2. Kebijakan Publik .....	8
2.3. Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.4. Kawasan Tanpa Rokok.....	12
<b>BAB III</b> .....	<b>14</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>14</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	14
3.2. Kerangka Konsep .....	15
3.3. Definisi Konsep.....	16
3.4. Kategorisasi .....	17
3.5. Narasumber .....	18
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	19

3.7. Teknik Analisis Data .....	21
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	23
<b>BAB IV .....</b>	<b>27</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	27
4.1.1. Kebijakan yang Ideal .....	28
4.1.2. Kelompok Sasaran .....	32
4.1.3. Organisasi Pelaksana.....	36
4.1.4. Faktor Lingkungan.....	40
4.2. Pembahasan Penelitian .....	43
4.2.1 Adanya Kebijakan yang Ideal .....	43
4.2.2. Adanya Kelompok Sasaran.....	45
4.2.3. Adanya Organisasi Pelaksana.....	46
4.2.4. Adanya Faktor Lingkungan .....	47
<b>BAB V.....</b>	<b>43</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
5.1. Simpulan.....	43
5.2. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1. Kerangka Konsep.....</b>	<b>15</b>
<b>Gambar 3.2. Peta Lokasi</b>	
<b>Dinas Kesehatan Kab Serdang Bedagai.....</b>	<b>23</b>
<b>Gambar 3.3. Struktur Dinas Kesehatan Serdang Bedagai.....</b>	<b>25</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rokok merupakan zat adiktif karena dapat menyebabkan ketagihan serta ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Di dalam rokok terkandung kurang lebih 4000 bahan kimia, dimana 400 diantaranya beracun dan 40 diantaranya dapat berakumulasi dalam tubuh penyebab kanker. Data dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) berjudul Tobacco Control Atlas menunjukkan Indonesia menduduki peringkat pertama dengan jumlah perokok tertinggi di ASEAN, yakni 65,19 juta orang. Di Indonesia terdapat 2,5 juta gerai yang menjadi pengecer rokok. Angka ini belum memperhitungkan kios penjual rokok di pinggir-pinggir jalan. Tingginya jumlah perokok di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yakni antara lain harga yang terjangkau oleh masyarakat dari kelas atas maupun sampai kelas menengah ke bawah, bisa dibeli secara eceran serta anak usia dibawah 18 tahun dapat membeli rokok secara legal. Dengan tingginya jumlah perokok, pasti berbanding terbalik dengan tingkat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, pada tahun 2020 WHO melansir bahwa ada sekitar 225.700 orang di Indonesia meninggal akibat merokok, atau penyakit lain yang berhubungan dengan tembakau.

Dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dengan kata lain, Pemerintahan Kabupaten sebagai bagian

dari Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok didaerahnya. Hal yang sama termuat pula dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan. Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, disebutkan bahwa KTR diatur dalam Perda. Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai di Sumatera Utara telah mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai. Melalui Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai meminta seluruh warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Secara spesifik dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat pada pasal 9 ayat (2) dijelaskan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Tempat umum
- b. Tempat kerja
- c. Tempat ibadah
- d. Tempat bermain anak-anak
- e. Angkutan Umum
- f. Lingkungan tempat proses belajar mengajar
- g. Fasilitas layanan kesehatan
- h. Fasilitas layanan olahraga
- i. Tempat lainnya yang ditetapkan

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berlaku semenjak tahun 2013, namun masih banyak permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan isi kebijakan tersebut. Berdasarkan observasi peneliti terhadap beberapa Kawasan Tanpa Rokok, masih ditemukan perokok di lingkungan yang merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, contohnya di taman kanak-kanak masih ada orangtua yang merokok sembari menjemput anaknya.

Tindak lanjut dari adanya dampak rokok bagi kesehatan manusia dan lingkungan, maka pemerintah daerah kabupaten Serdang Bedagai membuat peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai Rilis peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 06 September 2013. Peraturan ini tidak lepas dari sejumlah pertimbangan, diantaranya bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat. Juga bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok namun ikut menghisap rokok orang lain.

Pada kenyatannya banyak perokok yang masih melanggar Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan tetap merokok di area tersebut. Sering dijumpai pula pelanggaran tersebut terjadi di sekolah dan fasilitas kesehatan. Sekolah merupakan salah satu kawasan tanpa rokok, karena akan mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar. Beberapa guru, tenaga kependidikan bahkan kepala sekolah dengan santainya merokok di sekolah tanpa memikirkan akibat dari kebiasaan yang tidak baik tersebut. Efek dari

kebiasaan itu adalah ketika para siswa yang melihatnya merasa bahwa merokok adalah hal yang wajar dilakukan. Anggapan tersebut sedikit banyak akan memberikan pengaruh bagi pelajar untuk mencoba merokok. Sebagian pelajar di Indonesia kini telah menjadi perokok aktif. Difasilitas kesehatan masih banyak masyarakat yang tidak taat, dengan merokok disekitaran faskes dimana dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yaitu, “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”. Penelitian ini bertujuan unruk mengkaji implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai.

## **1.2. Pembatasan Masalah**

Adapun fokus dan lokus yang ditetapkan peneliti dalam menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, Desa Paya Bagas dan Desa Paya Mabar

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan msalah pada penilitian ini adalah: bagaimana implementasi Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini : adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

##### 1. Aspek Teoritis

Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai.

##### 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi mahasiswa maupun lembaga – lembaga setempat.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab lainnya yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah implementasi, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, kawasan tanpa rokok.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi**

Herlina, (2016) implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2012) Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Ekawati (Taufik dan Isril, 2013:136) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya” Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran Grindle, (1998).

Menurut Mahardika & Rizki (2021) implementasi menyangkut semua upaya yang harus dipenuhi untuk merealisasikan isi kebijakan kedalam tindakan yang nyata, terencana, sistematis, dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

## **2.2. Kebijakan Publik**

Menurut Koontz dan O'Donnel (Tahir, 2015:21), kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya menurut Hamdi (2014:33) menyatakan, kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, di samping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik. Menurut Mulyadi (2015:37) menambahkan, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Menurut Dye Dwiyanto Indiahono (2009 : 17) kebijakan publik adalah *Whatever government choose to do or not to do*. Maksudnya bahwa apapun

kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Handoyo dalam Nugroho (2009:11) Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Menurut Zahara & Nengyanti (2019) Tujuan kebijakan diharapkan akan diperoleh setelah dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Istilah kebijakan (policy term) digunakan secara luas seperti “kebijakan luar negeri indonesia”, “kebijakan ekonomi jepang” atau “kebijakan pertanian di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga”. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan keputusan yang berbeda. Secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Budi Winarno (2013, hal 18-19)

Berdasarkan definisi kebijakan publik dari beberapa ahli dapat disimpulkan kebijakan publik adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan

rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginankeinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

### **2.3. Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Waluyo (2007:50-57), implementasi kebijakan merupakan terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Kemudian Wahab (Tahir, 2014:55), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Grindle (Subarsono, 2005), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni : bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni :

- a. Isi kebijakan, kepentingan kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan

- b. Lingkungan implementasi kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (Subarsono, 2005), dipengaruhi empat variabel, yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan kemudian struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pendapat para ahli dapat didefinisikan, implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier dalam Ismail (2009:131) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan oleh badan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Sehingga implementasi adalah proses bagaimana perubahan data atau informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena

implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Rizky & Mahardika, (2023). Syukur dalam Surmayadi (2005:79), berpendapat ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :), berpendapat ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

- 1) Program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya target dan kelompok masyarakat, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksana (implementor, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan dan proses implementasi tersebut.

Menurut Sunggono (1994:137) bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

#### **2.4. Kawasan Tanpa Rokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai rokok. Menjelaskan Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan rokok. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif terhadap risiko paparan tembakau orang lain. merokok, menyediakan ruang dan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat bagi masyarakat serta melindungi

kesehatan masyarakat dari dampak negatif rokok, baik langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau kawasan yang diberi pagar luar untuk keperluan merokok, produksi, penjualan, periklanan dan/atau promosi produk rokok. Penetapan kawasan bebas tembakau merupakan upaya melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan akibat asap rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah dan tempat tinggal anak, angkutan umum, tempat pengajaran, dan tempat pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan tempat umum adalah bagi yang mempunyai izin niaga wajib menyediakan kawasan tanpa rokok. Pemilik, pengelola, petugas dan pejabat wajib menyediakan kawasan khusus merokok, memasang tanda dilarang merokok dan melarang perokok memasuki kawasan tanpa rokok, serta bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Area khusus merokok juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: terpisah dari ruangan yang diperuntukkan bagi kawasan bebas rokok, dilengkapi ventilasi, dan mempunyai sirkulasi udara yang memadai. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan mendirikan kawasan tanpa rokok. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit usaha, dan organisasi. Menurut Ida Martinelli dkk (2021) partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat di semua tahapan proses perkembangan yang ada didalam suatu kelompok masyarakat. Masyarakat menggunakan hak asasinya untuk dilindungi dari paparan asap tembakau orang lain, turut sermembimbing,

menasihati dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, mengingatkan atau menegur perokok agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok berdampak pada kualitas udara terutama udara di dalam ruangan. Dari bidang ekonomi, mampu meningkatkan ekonomi keluarga karena berkurangnya membeli rokok terutama pada keluarga yang kurang mampu. Dari bidang pemerintahan, akan mengurangi pengeluaran belanja daerah untuk biaya kesehatan untuk menanggulangi penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan studi kasus deskriptif dimaksudkan untuk menelaah, menganalisis, dan mendeskripsikan mengapa selain sebagai suatu kewajiban berdasar peraturan hukum, Kabupaten Serdang Bedagai mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di tempat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak tegas dan di mana multisumber buku dimanfaatkan. Menurut Nazir (2016) Jenis deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan Sugiyono (2017) "Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu"

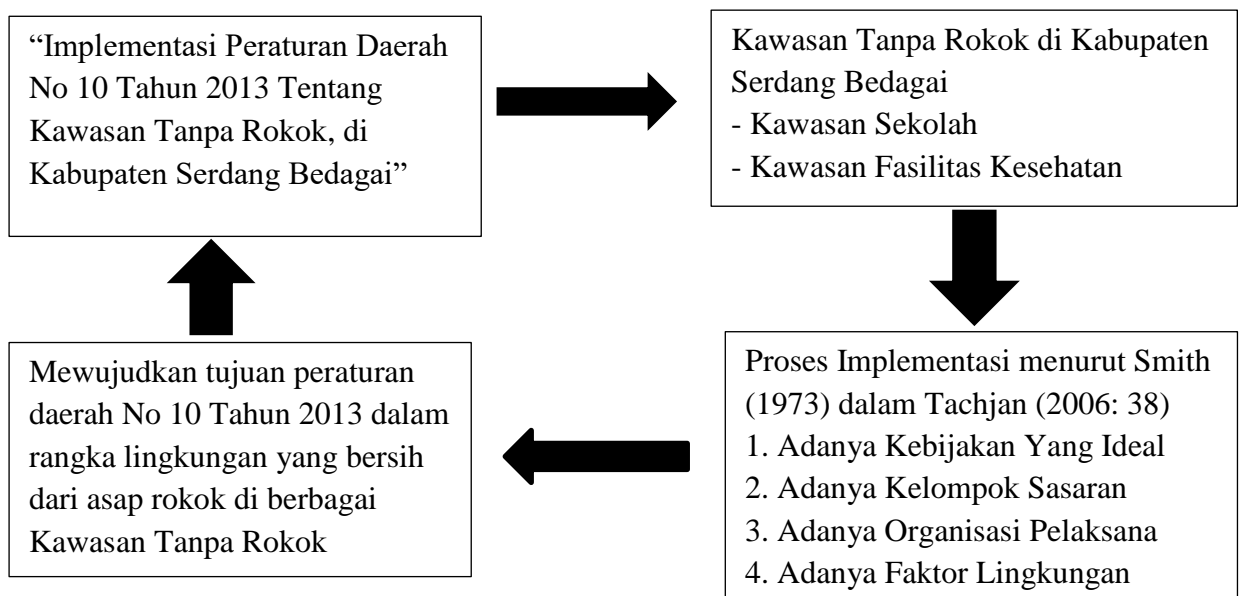
Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari data, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau peristiwa. Menurut (Hamdan, 2022), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

### 3.2. Kerangka Konsep

Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Kerangka konseptual harus dapat menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti.



*Gambar 3.1 Kerangka Konsep*

Dari gambar sebelumnya dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti Dengan judul Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai.

### **3.3. Definisi Konsep**

Menurut Sugiyono (2014:38) definisi konseptual adalah atribut, kepribadian, atau nilai seseorang, sebagai objek dengan variasi tertentu, yang ditentukan dan disimpulkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut maka definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
- b. Kebijakan Publik  
Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan sebelumnya.
- c. Implementasi Kebijakan Publik  
Implementasi kebijakan publik adalah proses bagaimana perubahan data atau informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.
- d. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

### 3.4. Kategorisasi

Definisi kategorisasi menurut Kountur (2009: 192) : “Kategorisasi yaitu proses penyusunan kembali catatan yang diperoleh dari wawancara atau hasil observasi menjadi bentuk yang sistematis. Menurut Smith (1973) dalam Tachjan (2006: 38), proses implementasi kebijakan dipandang sebagai interaksi (interaction) antara berbagai pihak yang terlibat, dengan fokus pada perspektif bottom-up (dari bawah). Model ini menekankan bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tentang menuruti kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga tentang bagaimana interaksi antara berbagai pihak dalam proses tersebut dapat memengaruhi keberhasilan implementasi. Menurut Smith (1973) dalam Tachjan (2006: 38) Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dikategorisasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

a. Adanya Kebijakan Yang Ideal

Untuk mencapai implementasi Peraturan Daerah diperlukan kebijakan yang ideal yang mencakup aspek-aspek seperti Sosialisasi dan Edukasi yang Komprehensif, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung, Dukungan dan Keterlibatan Semua Pihak.

b. Adanya Kelompok Sasaran

Penerapan implementasi membutuhkan strategi yang tepat untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran

utama: Perokok Aktif, Non-Perokok, Pengunjung Fasilitas Kesehatan, Guru Sekolah dan Masyarakat Umum.

c. Adanya Organisasi Pelaksana

Organisasi yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

d. Adanya Faktor Lingkungan

Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi implementasi Peraturan Daerah no 10 Tahun 2013 di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, Ketidaktegasan Penegakan Hukum, Sarana dan Prasarana yang Tidak Mendukung, Kebiasaan dan Budaya Merokok dan Faktor Ekonomi.

### 3.5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini "Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai" yakni beberapa narasumber pihak pengelola tempat kawasan tanpa rokok. Penulis menetapkan narasumber yakni:

- 1) Nama : Ibu Sasan Helena Ginting
- Alamat : Jl. Negara No. 300, Sei Rampa
- Unit Kerja : Dinas Kesehatan Serdang Bedagai
- Usia : 52 Tahun

2) Nama : Bapak Endi Ifrizal Sihombing,S.Pd,  
Alamat : Paya Bagas, Kec. Tebing Tinggi  
Unit Kerja : SMK NEGERI 1 Tebing Tinggi  
Usia : 50 Tahun

3) Nama : Ibu Diana Ranita S.K.M  
Alamat : Jalan Lintas Medan Mesjid Rambutan  
Unit Kerja : Puskesmas Paya Bagas  
Usia : 33 Tahun

4) Nama : Ibu Rani Dania Harahap  
Alamat : Jl. Gunung Arjuna, Kec Tebing Tinggi  
Unit Kerja : Ibu Rumah Tangga  
Usia : 52 Tahun

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari berbagai sumber. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat untuk mendukung penelitian atau analisis tertentu. Berbagai teknik dapat digunakan, termasuk observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sugiyono (2018) mengungkapkan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data.

a. Teknik pengumpulan data primer :

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada sumber datanya. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli atau pertama. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Melibatkan responden utama dari pengguna angkutan umum, pengemudi, dan pemangku kebijakan. Analisis dokumen adalah metode penelitian yang melibatkan evaluasi dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen tertulis, seperti laporan, artikel, surat, dan catatan lainnya. Tujuan dari analisis dokumen adalah untuk memahami isu-isu tertentu, mengekstrak informasi relevan, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada dalam sumber tertulis tersebut.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

1) Publikasi pemerintah

Publikasi pemerintah, seperti sensus penduduk, statistik perdagangan, dan laporan keuangan pemerintah, merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya tersedia secara gratis atau dengan biaya yang relatif terjangkau.

2) Publikasi ilmiah

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan prosiding, juga merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya ditulis oleh para ahli di bidangnya dan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini.

3) Situs web.

Situs web merupakan sumber data sekunder yang mudah diakses dan dapat diperbarui secara berkala. Data-data yang tersedia di situs web dapat berupa data kuantitatif, seperti data statistik, maupun data kualitatif, seperti data berita dan opini.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari data, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau peristiwa. Teknik analisis data merujuk pada proses mengorganisir, menginterpretasi, dan menyelidiki data untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang bermakna. Dengan teknik analisis data, peneliti atau analis dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam dataset untuk membuat keputusan yang informasional. Dalam konteks implementasi peraturan daerah

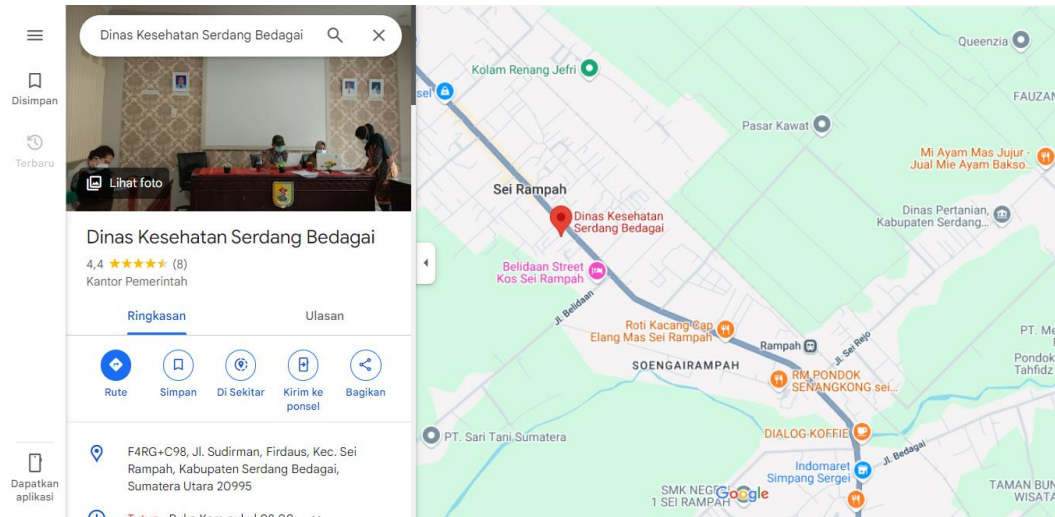
No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, teknik analisis data dapat melibatkan beberapa langkah, antara lain:

- a. Pengumpulan Data: Kumpulkan data terkait implementasi peraturan daerah No 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai. Ini bisa mencakup data jumlah pelanggaran, tingkat kepatuhan, dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
- b. Pengolahan Data: Lakukan pengolahan data untuk mengorganisir informasi yang terkumpul. Misalnya, kategorikan data berdasarkan jenis pelanggaran, waktu kejadian, dan jenis Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Analisis Dampak: Evaluasi dampak implementasi kebijakan dengan membandingkan data sebelum dan setelah penerapan peraturan. Hal ini dapat melibatkan perbandingan jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Proses analisis dapat melibatkan pengelompokan data, pengkategorian informasi, dan penyusunan temuan untuk mendukung tujuan penelitian. Menyelidiki dokumen-dokumen terkait kebijakan dan laporan implementasi.

### **3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Kawasan Sekolah dan Kawasan Fasilitas Kesehatan, dengan dibatasi pada 2 Lokasi yaitu Desa Paya Mabar dan Desa Paya Bagas.

**Gambar 3.2.** Peta Lokasi Dinas Kesehatan Kab, Serdang Bedagai



Sumber: <https://maps.app.goo.gl/Zc6U4ureeMnzeUrN8>

### 3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

#### a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok membantu Bupati Serdang Bedagai melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi.

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.

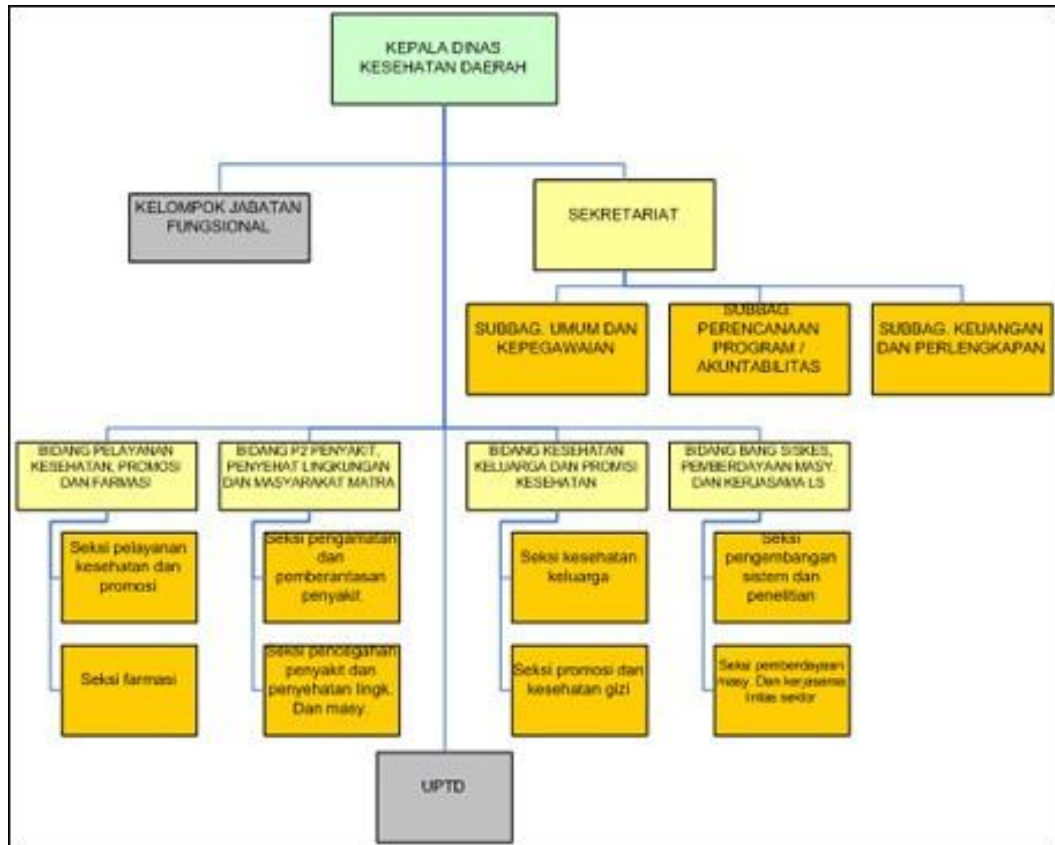
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati di bidang kesehatan.

b. Tujuan

Tujuan utama Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Lebih spesifik, KTR bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mengurangi angka perokok dan mencegah perokok pemula.

c. Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai

*Gambar 3.3 Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kab. Serdang Bedagai*



Sumber: <https://dinkes.serdangbedagaidkab.go.id/struktur-organisasi/>

- 1) Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :
  - a) kepala dinas;
  - b) sekretariat;
  - c) bidang kesehatan masyarakat;
  - d) bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - e) bidang pelayanan kesehatan; dan
  - f) bidang sumber daya kesehatan.
  - g) unit pelaksana teknis dinas (UPTD);

- h) kelompok jabatan fungsional.
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
    - a) subbagian umum dan kepegawaian;
    - b) subbagian keuangan dan perlengkapan;
    - c) subbagian perencanaan program dan akuntabilitas.
  - 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
    - a) seksi kesehatan keluarga dan gizi;
    - b) seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, promosi dan pemberdayaan masyarakat
  - 4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
    - a) seksi surveilans dan imunisasi;
    - b) seksi pencegahan dan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa.
  - 5) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    - a) seksi pelayanan kesehatan primer;
    - b) seksi pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional.
  - 6) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
    - a) seksi sumber daya manusia kesehatan;
    - b) seksi kefarmasian, alat dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dengan demikian, Dinas Kesehatan Serdang Bedagai bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

Bab ini Penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara yang mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi penulis. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulannya. Analisis ini berfokus pada kawasan tanpa rokok yang dibatasi dengan penelitian di lingkungan proses belajar mengajar dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh dinas kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, dalam implementasi peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai.

Penulis berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan dari setiap informan yang telah diwawancarai mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai” Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih. Sumber data pada penelitian ini

berjumlah lima orang, satu (1) orang dari pihak Dinas Kesehatan selaku yang membidangi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, satu (1) orang guru, satu (1) orang dari pelayanan kesehatan selaku penanggung jawab Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan satu (1) orang masyarakat pengunjung Puskesmas Desa Paya Bagas.

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini, setiap pertanyaan yang diajukan peneliti akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini, berikut adalah penyajian data yang diperoleh dari hasil wawancara Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **4.1.1. Kebijakan yang Ideal**

Dalam bagian ini dibahas mengenai keefektifan dan sejauh mana narasumber mengetahui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai dan langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mensosialisasikan perdan ini.

Menurut narasumber satu Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai bahwasannya sejak Perda Kawasan Tanpa Rokok diberlakukan di Kabupaten Serdang Bedagai pada awal 2013, Dinas Kesehatan terus bekerja secara sistematis guna mencapai tujuan utama yaitu melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, khususnya non-perokok, ibu hamil, anak-anak, pelajar, dan tenaga kesehatan. Sebagai pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai,

cukup memahami secara menyeluruh isi dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang berlaku di wilayah ini.

Perda ini dibuat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya yang ditentukan pemerintah daerah. Juga diketahui bahwa dalam Perda ini diatur dengan jelas larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, maupun mempromosikan produk tembakau di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, juga terdapat ketentuan sanksi administratif bagi pelanggar, termasuk teguran, denda, atau sanksi sosial. Dari Dinas Kesehatan, telah melakukan beberapa langkah strategis dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai seperti sosialisasi langsung ke masyarakat, menggunakan media cetak dan media sosial juga melakukan pelatihan internal untuk para ASN tenaga kesehatan agar mereka menjadi teladan dalam mematuhi peraturan ini. Dengan semua langkah ini Dinas Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kawasan tanpa rokok bisa meningkat.

Menurut narasumber dua Bapak Endi Ifrizal Sihombing selaku Guru SMK Negeri 1 Tebing Tinggi bahwasannya penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi sudah cukup efektif, terutama di lingkungan sekolah. Sekolah telah memasang rambu-rambu

larangan merokok dan rutin melakukan sosialisasi kepada siswa mengenai bahaya merokok dan pentingnya menjaga kesehatan. Namun, tantangan terbesar masih ada pada pengaruh luar sekolah, di mana beberapa siswa merokok di luar area sekolah. Meski demikian, pemerintah daerah sudah melakukan pemantauan dan penegakan hukum, dan adanya harapan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat memperkuat penerapan KTR agar lingkungan lebih sehat dan bebas asap rokok.

Sekolah juga cukup memahami Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, yang mengatur larangan merokok di tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, semua mendukung penuh penerapan perda ini dengan menyosialisasikan kepada siswa dan keluarga agar tercipta lingkungan yang sehat dan bebas rokok.

Menurut menurut narasumber dua Ibu Diana Ranita selaku pegawai administrasi di Puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya di wilayah Puskesmas Paya Bagas, sudah cukup efektif. Pihak puskesmas telah memasang tanda larangan merokok di berbagai area fasilitas kesehatan, seperti ruang tunggu dan sekitar puskesmas, serta rutin melakukan sosialisasi kepada pasien dan masyarakat tentang bahaya merokok. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam mengubah kebiasaan di luar puskesmas, seperti di tempat umum lainnya. Meskipun begitu, dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan

masyarakat, pelayanan kesehatan optimis penerapan ini akan semakin membaik dan memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat.

Menurut narasumber tiga Ibu Rani Dania Harahap, sebagai masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, Ibu Rani melihat bahwa penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai sudah mulai terlihat dampaknya, terutama di tempat-tempat umum seperti sekolah, rumah sakit, dan taman. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya lingkungan bebas rokok, meskipun masih ada beberapa orang yang merokok di tempat umum yang tidak terpantau. Namun, dengan adanya pemasangan tanda larangan merokok dan sosialisasi dari pemerintah, Ibu Rani merasa kedepannya akan semakin banyak orang yang mengikuti aturan ini demi kesehatan bersama dan Masyarakat merasa langkah yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok sudah cukup baik.

Pihak Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti spanduk, baliho, dan juga media sosial yang menjangkau masyarakat luas. Selain itu, pihak kecamatan dan desa juga sering mengadakan pertemuan untuk mengingatkan warga tentang pentingnya hidup sehat tanpa rokok. Namun, mungkin masih perlu lebih banyak pengawasan langsung di beberapa tempat umum, karena kadang-kadang terlihat orang merokok di tempat yang seharusnya bebas asap rokok. Tapi, secara keseluruhan, upaya pemerintah sudah menunjukkan hasil yang positif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup optimal dengan ditunjukkan kemajuan yang positif, terutama di lingkungan sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat, telah berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kawasan bebas rokok melalui pemasangan rambu-rambu, sosialisasi langsung, dan penggunaan media massa. Meskipun sudah ada peningkatan kesadaran, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan perilaku merokok di tempat umum yang masih ditemukan di beberapa area.

Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah seperti patroli, edukasi, dan kerjasama dengan pihak terkait, namun pengawasan yang lebih intensif dan kesadaran kolektif masyarakat masih diperlukan untuk menjamin efektivitas penerapan perda ini. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kendala, upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok di masa depan.

#### **4.1.2. Kelompok Sasaran**

Pada bagian ini dibahas mengenai pandangan narasumber terhadap implementasi kawasan tanpa rokok yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 dan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan peraturan daerah ini, serta bagaimana penerapan kawasan tanpa

rokok jika melibatkan kelompok sasaran tertentu seperti pelajar atau pekerja akankah dapat lebih efektif.

Menurut narasumber satu, Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai bahwasannya Sebagai staf Dinas Kesehatan, Ibu Sasan melihat implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan di Serdang Bedagai sudah cukup baik dengan sosialisasi yang intens dan penandaan larangan merokok yang jelas. Meskipun sudah ada kemajuan, tantangan utama Dinas Kesehatan adalah memastikan pengawasan yang konsisten, terutama di luar area fasilitas tersebut, agar upaya ini semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Untuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai semakin meningkat, terutama di sekolah dan fasilitas kesehatan, meskipun masih ada tantangan di beberapa tempat umum seperti pasar dan terminal, yang memerlukan pengawasan dan penegakan hukum lebih lanjut. Menurut Ibu Sasan penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai akan lebih efektif jika melibatkan kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok ibu-ibu. Dengan melibatkan mereka, informasi dan kesadaran tentang bahaya rokok dan pentingnya KTR bisa lebih mudah tersebar, karena kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh yang besar dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif dari kelompok tersebut dapat membantu memperkuat pengawasan di lapangan, serta memberikan dukungan moral dan sosial dalam mendukung kebijakan ini.

Menurut narasumber dua, dengan Bapak Endi Ifrizal Sihombing, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tebing Tinggi bahwasannya Bapak Endi melihat bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, terutama di sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan, sudah cukup baik, dengan penerapan aturan yang tegas dan sosialisasi yang intensif di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat di area seperti sekolah dan fasilitas kesehatan sudah cukup tinggi, masih ada tantangan di tempat umum lainnya, seperti pasar atau taman, di mana terkadang ditemukan orang yang merokok.

Oleh karena itu, Bapak Endi percaya penerapan KTR akan lebih efektif jika melibatkan kelompok tertentu, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan orang tua siswa, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan pesan tentang hidup sehat tanpa rokok dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan.

Menurut narasumber tiga, Ibu Diana Ranita selaku pegawai administrasi puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya Ibu Diana melihat implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, terutama di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Paya Bagas, sudah berjalan dengan baik. Di sini, pihak puskesmas telah memasang rambu larangan merokok di area yang rawan, serta melakukan sosialisasi kepada pasien dan masyarakat tentang bahaya rokok dan pentingnya menjaga lingkungan bebas asap rokok. Mengenai tingkat kepatuhan masyarakat, meskipun sudah ada kemajuan, masih ada beberapa individu yang merokok di area sekitar fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, Ibu Diana yakin bahwa melibatkan kelompok tertentu, seperti tokoh agama, pemuda, dan ibu-ibu PKK,

akan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda KTR, karena mereka memiliki pengaruh yang kuat di tingkat desa dan dapat membantu memperkuat pengawasan di lapangan.

Menurut narasumber empat, Ibu Rani Dania Harahap selaku masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai bahwasannya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, terutama di sekolah dan fasilitas kesehatan, sudah cukup baik. Banyak tempat umum seperti taman, sekolah, dan rumah sakit yang sekarang sudah bebas dari asap rokok, berkat adanya rambu larangan merokok dan sosialisasi dari pemerintah. Namun, di beberapa tempat seperti pasar atau di luar area fasilitas umum, masih ada saja orang yang merokok. Ibu Rani rasa tingkat kepatuhan masyarakat mulai meningkat, tapi untuk membuatnya lebih efektif, menurut Ibu Rani bahwa melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi perempuan akan sangat membantu. Mereka bisa menjadi penggerak perubahan, menyebarkan informasi, dan memberikan contoh baik dalam menjaga lingkungan bebas rokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang Bedagai, khususnya di sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintahan, telah menunjukkan kemajuan yang positif, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan bebas rokok. Meskipun tingkat kepatuhan di area tertentu sudah cukup baik, masih ada tantangan di tempat umum lainnya, seperti pasar atau taman, di mana beberapa orang masih merokok. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda KTR, melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi

masyarakat lainnya sangat penting, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam mengedukasi dan mengawasi kepatuhan masyarakat di tingkat lokal. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan implementasi KTR dapat lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok di Serdang Bedagai.

#### **4.1.3. Organisasi Pelaksana**

Dalam bagian ini dibahas mengenai sektor-sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, serta bagaimana koordinasi antar sektor dalam memastikan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok, dan program yang telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan untuk mendukung implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok

Menurut narasumber satu, Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, Selain Dinas Kesehatan, ada beberapa sektor lain yang turut berperan penting dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Dinas Pendidikan, misalnya, berperan dalam sosialisasi di sekolah-sekolah, memastikan lingkungan belajar bebas dari asap rokok. Dinas Lingkungan Hidup membantu dengan penataan kawasan publik yang sehat, sementara Satpol PP bertugas dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk menindak pelanggaran yang terjadi di tempat-tempat umum. Kerjasama antara berbagai sektor ini sangat penting agar

kebijakan KTR dapat diterapkan secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Untuk koordinasi antara Dinas Kesehatan dan sektor lainnya, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP, sangat erat dan terjalin dengan baik. Dinas Kesehatan rutin melakukan rapat koordinasi untuk membahas perkembangan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di setiap sektor dan mengevaluasi langkah-langkah yang perlu ditingkatkan. Misalnya, Dinas Pendidikan membantu Dinas Kesehatan dalam melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, Dinas Lingkungan Hidup memastikan lingkungan publik seperti taman dan area umum lainnya bebas dari rokok, sementara Satpol PP bertugas menegakkan aturan di lapangan. Dinas Kesehatan juga sering melakukan pemantauan bersama untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Dengan koordinasi yang solid antara sektor-sektor ini, Dinas Kesehatan yakin penerapan KTR di Serdang Bedagai akan semakin efektif dan berdampak positif pada kesehatan masyarakat.

Menurut narasumber dua, Bapak Endi Ifrizal Sihombing selaku Guru SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, bahwasannya Di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta pihak keamanan dan Satpol PP. Koordinasi antara sekolah dan sektor-sektor ini berjalan dengan baik, di mana sekolah sering melakukan rapat koordinasi untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif, seperti melakukan sosialisasi kepada siswa, guru, dan orang tua. Sekolah juga memiliki program khusus, seperti penyuluhan tentang bahaya rokok dan

pentingnya hidup sehat tanpa rokok yang dilakukan secara rutin, serta melibatkan siswa dalam kampanye antirokok. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap KTR, menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh warga sekolah.

Menurut narasumber tiga, Ibu Diana Ranita selaku pegawai administrasi puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya, sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Dinas Kesehatan bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya merokok, sementara Dinas Lingkungan Hidup membantu dalam menciptakan lingkungan fasilitas kesehatan yang bebas rokok. Satpol PP juga berperan dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan terkait KTR di sekitar area puskesmas.

Koordinasi antara Puskesmas dengan sektor-sektor ini sangat baik, puskesmas rutin melakukan pertemuan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif. Puskesmas juga memiliki program khusus seperti Penyuluhan Kesehatan dan Konseling Berhenti Merokok, di mana pelayanan kesehatan memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang bahaya rokok serta menyediakan dukungan untuk mereka yang ingin berhenti merokok. Program-program ini diharapkan dapat mendukung penerapan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Menurut narasumber empat, Ibu Rani Dania Harahap selaku masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Dinas Kesehatan bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok, sementara Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga kebersihan dan menciptakan lingkungan sehat di fasilitas kesehatan. Satpol PP juga turut mengawasi pelaksanaan aturan KTR di sekitar area fasilitas kesehatan. Mengenai koordinasi antara masyarakat dengan sektor-sektor pelaksana, Ibu Rani melihat cukup baik karena pihak pemerintah sering melakukan sosialisasi melalui pertemuan dan kampanye tentang pentingnya hidup sehat tanpa rokok. Untuk mendukung implementasi KTR, Ibu Rani dan keluarga sudah mengikuti program yang diselenggarakan, seperti penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas. Program-program ini membantu masyarakat untuk lebih memahami dampak buruk rokok dan pentingnya menjaga lingkungan bebas asap rokok.

Berdasarkan wawancara dengan keempat narasumber bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang Bedagai melibatkan berbagai sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, baik di fasilitas kesehatan, sekolah, maupun tempat umum. Koordinasi antar sektor berjalan dengan baik, dengan adanya sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan yang terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif. Selain itu, masyarakat, termasuk di tingkat sekolah dan fasilitas kesehatan, turut

berperan aktif melalui partisipasi dalam program-program penyuluhan dan konseling yang mendukung kebijakan KTR. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penerapan Kawasan Tanpa Rokok dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Serdang Bedagai.

#### **4.1.4. Faktor Lingkungan**

Pada bagian ini dibahas bagaimana pandangan narasumber terhadap dampak signifikan yang diberikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan peraturan daerah ini, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Menurut narasumber satu, Ibu Sasan Helena Ginting selaku pegawai dibidang Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai bahwa Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi paparan asap rokok di tempat-tempat umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat semakin sadar akan bahaya rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif.

Dinas Kesehatan juga melihat adanya penurunan jumlah pasien yang datang dengan masalah kesehatan terkait rokok, seperti penyakit pernapasan dan jantung. Tentu saja, ini adalah langkah positif menuju lingkungan yang lebih sehat. Meski tantangannya masih ada, terutama dalam hal pengawasan dan kesadaran di beberapa area, dampak positif dari kebijakan ini sudah mulai terasa, dan Dinas

Kesehatan berharap ke depan akan semakin banyak masyarakat yang teredukasi dan lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Partisipasi masyarakat dalam mendukung Perda KTR di Serdang Bedagai sudah cukup baik, terutama dari kelompok seperti ibu-ibu PKK dan pemuda yang aktif dalam sosialisasi. Namun, masih ada sebagian yang kurang sadar, terutama di tempat umum. Untuk meningkatkan kesadaran, perlu adanya sosialisasi lebih intensif melalui media sosial, penyuluhan di tingkat desa, dan melibatkan tokoh masyarakat serta agama. Pengawasan yang lebih ketat dan pemberian sanksi juga penting untuk mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

Menurut narasumber dua, Bapak Endi Ifrizal Sihombing selaku Guru SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, bahwasannya Di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, dengan mengurangi paparan asap rokok dan meningkatkan kesadaran siswa serta staf tentang bahaya merokok. Partisipasi masyarakat, khususnya di sekolah, sudah cukup baik, namun masih ada beberapa pihak yang kurang memahami pentingnya kebijakan ini, terutama di luar lingkungan sekolah. Untuk meningkatkan kesadaran, perlu ada upaya tambahan seperti sosialisasi lebih intensif melalui media sosial, melibatkan orang tua siswa, dan mengadakan kampanye antirokok di tingkat masyarakat, sehingga dukungan terhadap Perda KTR dapat semakin meluas dan efektif.

Menurut narasumber tiga, Ibu Diana Ranita selaku pegawai administrasi puskesmas Desa Paya Bagas bahwasannya, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini telah memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan masyarakat, terutama di

fasilitas kesehatan seperti puskesmas, di mana sekarang lingkungan fasilitas kesehatan menjadi lebih bersih dan sehat, jauh dari asap rokok. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ini mulai terlihat, terutama dari mereka yang datang untuk pengobatan, yang lebih sadar akan bahaya rokok. Namun, masih ada beberapa tantangan, terutama di luar fasilitas kesehatan, di mana masih ada sebagian orang yang merokok di area umum. Untuk meningkatkan kesadaran lebih lanjut, pelayanan kesehatan masih perlu lebih banyak program edukasi dan sosialisasi, baik melalui penyuluhan langsung maupun media sosial, agar masyarakat lebih paham dan mendukung kebijakan KTR ini dengan lebih konsisten.

Menurut narasumber empat, Ibu Rani Dania Harahap selaku masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, Perda Kawasan Tanpa Rokok ini memang memberikan dampak yang cukup positif terhadap kesehatan masyarakat, terutama di fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah, yang kini lebih bebas dari asap rokok. Masyarakat juga semakin sadar akan bahaya merokok, terutama bagi anak-anak dan orang tua yang lebih rentan. Meskipun demikian, masih ada sebagian orang yang kadang merokok di tempat umum seperti pasar atau taman. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lebih luas, perlu ada lebih banyak sosialisasi dari pemerintah, baik melalui kampanye di media sosial, penyuluhan di desa-desa, serta melibatkan tokoh masyarakat agar aturan ini bisa diterima dan dipatuhi dengan lebih baik.

Berdasarkan wawancara dengan keempat narasumber, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai telah

memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat cukup membantu dalam mendukung penerapan peraturan daerah ini, namun masih perlu upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pengawasan agar penerapannya lebih efektif di seluruh lapisan masyarakat.

## **4.2. Pembahasan Penelitian**

### **4.2.1 Adanya Kebijakan yang Ideal**

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses atau suatu aliran. Model Smith memandang proses implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan politik dan sosial, dimana kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk membawa perbaikan atau perubahan pada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Kebijakan yang diidealkan adalah suatu model interaksi yang diprakarsai oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup optimal dengan ditunjukkan kemajuan yang positif, terutama di lingkungan sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat, telah berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya kawasan bebas rokok melalui pemasangan rambu-rambu, sosialisasi langsung, dan penggunaan media massa. Meskipun sudah ada peningkatan kesadaran, tantangan tetap ada, terutama terkait

dengan perilaku merokok di tempat umum yang masih ditemukan di beberapa area.

Dalam hal ini, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong, mempengaruhi, dan menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Proses ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif berbagai pihak yang terkait, seperti masyarakat, sekolah, dan lembaga lainnya. Namun, tantangan yang disebutkan dalam wawancara, yaitu perilaku merokok yang masih ditemukan di beberapa area umum, juga menggambarkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran dan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa faktor eksternal yang memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan.

Sesuai dengan pandangan Smith, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan pendidikan publik mengenai bahaya merokok dan pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok. Secara keseluruhan, meskipun penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Serdang Bedagai telah menunjukkan hasil yang positif, tantangan dalam implementasinya masih perlu ditangani secara komprehensif agar kebijakan ini dapat lebih efektif mencapai tujuannya.

#### **4.2.2. Adanya Kelompok Sasaran**

Menurut Kotler dan Keller (2016) Kelompok sasaran adalah sekelompok orang dengan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa, yang menjadi sasaran strategi pemasaran suatu perusahaan.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang Bedagai, khususnya di sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintahan, telah menunjukkan kemajuan yang positif, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan bebas rokok. Meskipun tingkat kepatuhan di area tertentu sudah cukup baik, masih ada tantangan di tempat umum lainnya, seperti pasar atau taman, di mana beberapa orang masih merokok. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda KTR, melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi masyarakat lainnya.

Dalam pandangan Kotler dan Keller (2016) kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR), teori ini sangat relevan, terutama dalam memahami siapa yang menjadi sasaran kebijakan dan bagaimana cara terbaik untuk mengarahkannya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan, antara pendapat Kotler dan Keller mengenai kelompok sasaran dengan hasil wawancara yang diperoleh sudah ada kesesuaian dalam pemahaman tentang kelompok sasaran dan upaya untuk mempengaruhi perilaku mereka, meskipun ada kesesuaian tantangan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 ini menunjukkan bahwa tidak semua kelompok sasaran merespons kebijakan dengan cara yang seragam.

### **4.2.3. Adanya Organisasi Pelaksana**

Menurut Griffin, Ebert, dan Keller (2016), organisasi pelaksana adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan strategi dan program yang ditentukan oleh organisasi induk. Menurut Robbins dan Coulter (2014), organisasi pelaksana adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas operasional sehari-hari suatu organisasi.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai melibatkan berbagai sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, baik di fasilitas kesehatan, sekolah, maupun tempat umum. Koordinasi antar sektor berjalan dengan baik, dengan adanya sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan yang terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif. Selain itu, masyarakat, termasuk di tingkat sekolah dan fasilitas kesehatan, turut berperan aktif melalui partisipasi dalam program-program penyuluhan dan konseling yang mendukung kebijakan KTR.

Teori yang diajukan oleh Griffin, Ebert, dan Keller (2016), serta Robbins dan Coulter (2014), mengenai organisasi pelaksana, menjelaskan bahwa organisasi pelaksana adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan tugas operasional yang ditetapkan oleh organisasi induk. Kedua definisi ini menekankan pentingnya peran organisasi pelaksana dalam memastikan bahwa kebijakan atau strategi yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik di lapangan, melalui tugas-tugas operasional yang sesuai.

Dalam hasil wawancara yang menunjukkan koordinasi yang baik antar sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan KTR sudah sangat sesuai dengan teori tentang organisasi pelaksana yang diungkapkan oleh Griffin, Ebert, dan Keller (2016) serta Robbins dan Coulter (2014). Pelaksanaan kebijakan ini telah melibatkan berbagai organisasi pelaksana yang berfungsi secara operasional untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, diperlukan perhatian pada pengawasan dan evaluasi yang lebih mendalam serta keterlibatan lebih lanjut dari masyarakat dan sektor-sektor terkait.

#### **4.2.4. Adanya Faktor Lingkungan**

Menurut Emil Salim (1984), faktor lingkungan meliputi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik yang berwujud hidup maupun benda mati, dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor lingkungan (environmental faktor), khususnya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan. Hal terakhir yang perlu diperhatikan ketika menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung atau mendukung dapat menjadi sumber permasalahan akibat kegagalan implementasi kebijakan.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai telah memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, dengan adanya partisipasi masyarakat cukup membantu dalam

mendukung penerapan peraturan daerah ini, namun masih perlu upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pengawasan agar penerapannya lebih efektif di seluruh lapisan masyarakat.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Serdang Bedagai menunjukkan adanya keselarasan dengan teori Emil Salim terkait faktor lingkungan yang memengaruhi kebijakan publik. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pengawasan, sosialisasi, dan dukungan anggaran. Faktor lingkungan eksternal seperti kesadaran sosial dan dukungan politik sudah ada, namun faktor ekonomi dan pengawasan menjadi kendala utama dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap teori yang diajukan oleh para ahli dan hasil wawancara yang diperoleh, penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Secara umum, kebijakan ini selaras dengan teori-teori yang mengedepankan pentingnya kebijakan yang ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sejalan dengan pandangan Smith (1973) mengenai perubahan sosial dan politik, kebijakan ini telah berhasil mendorong perubahan perilaku, terutama di sekolah dan fasilitas kesehatan, melalui partisipasi aktif berbagai pihak. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah perilaku merokok di tempat-tempat umum yang belum

sepenuhnya terkendali, yang mencerminkan kebutuhan akan pengawasan lebih ketat dan penguatan sosialisasi.

Meskipun demikian, peran organisasi pelaksana yang melibatkan berbagai sektor, seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan, telah berjalan dengan baik, seperti yang dijelaskan dalam teori Griffin, Ebert, dan Keller (2016) tentang organisasi pelaksana. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh faktor eksternal seperti kesadaran sosial, dukungan politik, dan faktor ekonomi, yang berperan dalam pengawasan dan sosialisasi yang belum maksimal. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan yang positif, pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai memerlukan perhatian lebih pada peningkatan pengawasan, evaluasi, dan keterlibatan masyarakat untuk memastikan keberhasilan kebijakan secara menyeluruh dan lebih efektif di masa mendatang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan cukup efektif walaupun masih menghadapi beberapa kendala. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menggunakan teori Smith yaitu:

- a. Kebijakan yang diidealkan menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan cukup optimal dalam penerapan peraturan KTR dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Namun, meskipun kesadaran masyarakat meningkat, masih ditemukan perilaku merokok di beberapa area umum, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal.
- b. Kelompok sasaran Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Serdang Bedagai, khususnya di sekolah, rumah sakit atau kantor pemerintahan, telah menunjukkan kemajuan yang positif, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan bebas rokok. Meskipun tingkat kepatuhan di area tertentu sudah cukup baik, masih ada tantangan di tempat umum lainnya, seperti pasar atau taman, di mana beberapa orang masih

merokok. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda KTR, melibatkan kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi masyarakat lainnya.

- c. Organisasi Pelaksana Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai melibatkan berbagai sektor, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan, yang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, baik di fasilitas kesehatan, sekolah, maupun tempat umum. Koordinasi antar sektor berjalan dengan baik, dengan adanya sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan yang terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini diterapkan dengan efektif. Selain itu, masyarakat, termasuk di tingkat sekolah dan fasilitas kesehatan, turut berperan aktif melalui partisipasi dalam program-program penyuluhan dan konseling yang mendukung kebijakan KTR.
- d. Faktor lingkungan, dimana hasil penelitian menunjukkan Hal terakhir yang perlu diperhatikan ketika menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung atau mendukung dapat menjadi sumber permasalahan akibat kegagalan implementasi kebijakan.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 di Serdang Bedagai menunjukkan adanya keterkaitan faktor lingkungan yang memengaruhi kebijakan publik. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek pengawasan, sosialisasi, dan dukungan anggaran. Faktor

lingkungan eksternal seperti kesadaran sosial dan dukungan politik sudah ada, namun faktor ekonomi dan pengawasan menjadi kendala utama dalam keberhasilan kebijakan tersebut.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran - saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kabupaten Serdang Bedagai:

- a. Untuk mencapai kebijakan yang ideal perlunya meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya merokok, terutama di daerah yang kurang sadar akan pentingnya kebijakan ini. Pengawasan yang lebih ketat di tempat umum seperti pasar, taman, dan terminal. Pemberian insentif bagi wilayah yang berhasil dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan KTR bisa lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat di Serdang Bedagai.
- b. Adanya Kelompok Sasaran seperti masyarakat untuk lebih aktif mendukung kebijakan ini dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, terutama di area yang seharusnya bebas rokok seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Perlunya kesadaran masyarakat terhadap peraturan KTR di daerah melalui berbagai media. Dengan kesadaran dan kerjasama dari masyarakat, kebijakan KTR dapat lebih efektif dilaksanakan dan memberi manfaat yang besar bagi kesehatan bersama.

- c. Kepada organisasi pelaksana perlu melakukan perkuat penegakan hukum dengan menerapkan hukuman tegas bagi pelanggar peraturan KTR di wilayah tersebut.
- d. Untuk mengatasi dalam faktor lingkungan perlu menyediakan tempat khusus bagi perokok untuk merokok di luar KTR

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, D. (2022). Implementasi Perencanaan Berbasis Partisipatif Dalam Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Air Merah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(2), 169–177.
- Agustian, I., Saputra, H. E., & Imanda, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Pt. Jasarahrja Putra Cabang Bengkulu. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1), 42–60. <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.837>
- Arma, N. A., Syahfitri, A., & Simon, J. (2023). Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. *Warta Dharmawangsa*, 17(2), 922–942. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3200>
- Bunker, D. R. (2010). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar*. 1(1), 1–11.
- Cahyani, R. I., & Setiawan, H. (2023). Analisis Framing Model Robert N Entmant Mengenai Pemberitaan Tenaga Honorer Diangkat Menjadi Pns Pada Media Daring Cnbc Indonesia dan Detik.com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 207–213.

Diana, D. (2022). Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Petugas tentang Penggunaan APD di Bagian Limbah RSUD Prof. Dr. Ma. Hanafiah SM. Batusangkar Tahun 2022. *Karya Tulis Ilmiah*, 28.

Elda Lahesti, & Ema Sapitri. (2022). Evaluasi Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Bidang Sarana Infrastruktur Di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 23–29. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i2.31>

Fenti, R. (2019). *Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Bengkalis (studi Kasus Di ....* <https://repository.uir.ac.id/6555/>

Hamdan, subakti hanin; prisusanti dewi retno; fahmi aisyah; haryanti suci; pangestu ari nova; primasari anggun nesy; putri surya novita; adinata arfan A. hadi irwan; firmansyah. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

Hardiati, Hamdie, A. N., & Junaidy. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Pada Pasar Sungai Danau Raya di Kabupaten Tanah Bumbu). *Concept and Communication*, null(23), 301–316.

Irfan, I. I. (2022). *Implementasi Perda No 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang*. 2458(3), 1–10.

[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/09/ejournal\\_icha\\_2\\_\(1\)\\_09-09-22-01-52-52\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/09/ejournal_icha_2_(1)_09-09-22-01-52-52).pdf)

Khusufmawati, E., Nurasa, H., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional ). *Jurnal MODERAT*, 7(4), 713–724.

Londah, A. A., Tampi, G. B., & Londa, V. Y. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 12–25.

Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2022). “Strategi Pembelajaran Daring Di Dinas Pendidikan.” 3.

Nim, E., Triyono, J., & Ningtias, D. K. (n.d.). *PubliKA , Jurnal Ilmu Administrasi Publik KALIMANTAN BARAT Oleh : Email : e1012161041@student.untan.ac.id 1 . Mahasiswa Prograam Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Ilmu Politik Universita.*

Rani, N., & Martinelli, I. (2023). Deskriptif. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 2–3.  
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/article/view/19932>

Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN

MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>

Rompis, I. K., Lengkong, F. D. J., & Tampi, G. B. (2022). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik JAP*, VIII(116), 55–62.

Simanjuntak, L., Handayani, P., Raudah, H. I. A., & Ivana, J. (2023). Implementasi Keijakan Pemerintah Mendorong Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 381–388. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4026>

Stevani, F., & Rizky, R. N. (2023). *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan ( JAPK ) Volume 3 , Nomor 2 , Desember 2023 ISSN 2807-6729 Implementasi Kebijakan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Camat Hatonduhan Kabupaten Simalungun. 3, 29–36.*

Studies, S. (2023). *Analisis Kinerja Dprd Kota Samarinda Periode 2014-2019 Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Analysis of the Performance of the Samarinda City Dprd for the 2014-2019 Period. 1(1), 159–174.*

Sugiannor, S. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 2(2), 1–33. <https://doi.org/10.24239/madika.v2i2.1357>

Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(2), 223–229.

<https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v3i2.42>

Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4).

<https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Draf Wawancara Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran II	: SK – 1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran III	: SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran IV	: SK – 3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran V	: SK – 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran VII	: Surat Terima Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
Lampiran VIII	: Surat Selesai Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai
Lampiran IX	: Surat Bebas Pinjaman Buku
Lampiran X	: SK – 10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: LoA Jurnal
Lampiran XII	: Dokumentasi

Handwritten signature and date: 27/03/2015

**DRAFT WAWANCARA  
PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Oleh : Eriska Sumita, Npm: 2103100046  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik**

---

**Nama :**

**Alamat :**

**Pekerjaan:**

**Pertanyaan &**

**Kategorisasi Penelitian :**

**1. Adanya Kebijakan yang Ideal**

- (1) Selamat pagi/siang/sore, bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Serdang Bedagai. Apakah sudah efektif?
- (2) Sejauh mana bapak/ibu mengetahui peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Serdang Bedagai?
- (3) Langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam mensosialisasikan peraturan ini?

**2. Adanya Kelompok Sasaran**

- (1) Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai implementasi kawasan tanpa rokok di tempat umum, seperti di sekolah, rumah sakit, atau kantor pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai?
- (2) Apakah bapak/ibu melihat tingkat kepatuhan yang tinggi dari masyarakat di kawasan tanpa rokok Kabupaten Serdang Bedagai?
- (3) Apakah bapak/ibu merasa bahwa penerapan kawasan tanpa rokok dapat lebih efektif jika melibatkan kelompok sasaran tertentu, seperti pelajar atau pekerja?

**3. Adanya Organisasi Pelaksana**

- (1) Selain dinas kesehatan sektor/dinas apa lagi yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di Kabupaten Serdang Bedagai?
- (2) Bagaimana koordinasi antara dinas kesehatan dengan sektor atau dinas lainnya sebagai pelaksana dalam memastikan kebijakan kawasan tanpa rokok diterapkan dengan efektif di Kabupaten Serdang Bedagai?
- (3) Apakah dinas kesehatan memiliki program khusus yang mendukung implementasi kawasan tanpa rokok? Jika ya, bisa dijelaskan lebih lanjut?

#### **4. Adanya Faktor Lingkungan**

- (1) Menurut pengalaman bapak/ibu, apakah peraturan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat?
- (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan perda ini untuk menjaga kawasan bebas asap rokok?
- (3) Apakah menurut bapak/ibu perlu adanya upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK/KPI/PT/II/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fkip.umu.ac.id fkip@umu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMCHONAN PERSetujuan**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan, 11 Desember.....2024.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Erika Sumita  
 NPM : 20300096  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 SKS diperoleh : 180 SKS, IP Kumulatif 3,67

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	<u>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Serdang Bedagai</u>	<u>Ace 1/2 2024</u>
2	<u>Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2020 Tentang bantuan Sosial di Serdang Bedagai</u>	
3	<u>Implementasi Peraturan Daerah No 15 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Serdang Bedagai</u>	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 11 Desember.....2024.

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

(.....)  
 NIDN: 0122

054

Perjohon,

Erika Sumita  
 (.....)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(IDA MARTA WELLY)  
 NIDN: 0008056402

PB: IDA MARTA WELLY S.H M.M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [f](#) [i](#) [u](#) [m](#) [s](#) [u](#) [m](#) [e](#) [d](#) [a](#) [n](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING  
TUGAS AKHIR MAHASISWA  
Nomor : 2219/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **11 Desember 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ERISKA SUMITA**  
N P M : 2103100046  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SERDANG BEDAGAI**  
Pembimbing : **IDA MARTINELLI, .S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 054.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Juni 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 13 Djumadil Akhir 1446 H  
14 Desember 2024 M

Dekan,  
  
**Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.**  
NIDN. 030017402  




**Tembusan:**

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Dita menjwab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PELMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fisp.umsu.ac.id> ✉ [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) 📺 [umsuac.id](#) 📱 [umsuac.id](#) 📧 [umsuac.id](#) 📧 [umsuac.id](#) 📧 [umsuac.id](#)

Sk-3

**PERMOHONAN**  
**SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Y'th.  
**Bapak Dekan FISIP UMSU**  
di  
Medan.

Medan, 15 Februari 2025

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Friska Sumita  
N P M : 2103100016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2219/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 11 Desember 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG  
KAWASAN TAMPIL ROKOK DI SERDANG BEDAGAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proprosals Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

(Dr. John Rido Laborsyah S.Sos)

NIDN: 0117019201

Menyetujui

Pembimbing

(Lia Martinelly, SH, MM)

NIDN: 008036402

Pemohon

(Friska Sumita)





**UMSU**  
Unggul dalam Ilmu

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 470/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	ERISKA SUMITA	2103100046	WINDA S MELIALA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SERDANG BEDAGAI
2	MUSSADDAD KHAIRIL AZMI	2103100038	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGENUJDI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
3	EKA WAHYUDI	2103100056	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA DI KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG KABUPATEN LANGKAT
4	RINALDI	2103100065	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN HIV DAN AIDS DI KOTA MEDAN
5	ARDIAN SYAHPUTRA SIREGAR	2103100028	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Medan, 19 Syaban 1446 H  
19 Februari 2025 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pd/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Muallim No. 100, Medan 22144 Telp. (061) 66224542 Fax. (061) 6621403

<https://fisip.umsu.ac.id>

[fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bisa menjawab surat ini agar dijawab nomor dan tanggalnya

**Hai : Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Kepada Yth : Kepala Dinas Kesehatan Serdang Bedagai  
 di-  
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Kesehatan Serdang Bedagai, atas nama :

Nama mahasiswa	: ERISKA SUMITA
N P M	: 2103100046
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SERDANG BEDAGAI

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Negara No.300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995  
Telepon (0621) 442133, laman serdangbedagaikab.go.id,  
Pos-el: dinkesperenc@gmail.com

Sei Rampah, 17 April 2025

Nomor : 18.12 / 440.441 / 1066 / IV / 2025  
Lamp : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di –  
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor: 666/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 22 Maret  
2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian :

Nama : ERISKA SUMITA  
NIM : 2103100046  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SERDANG BEDAGAI

Dengan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan tidak keberatan  
dan bersedia memberi Izin Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai. Pada  
akhir survei/riset/wawancara kami harap hasil kegiatan (dalam bentuk laporan) tersebut  
dapat disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai cq.  
Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Serdang Bedagai

dr. Yohnly Boelian Dachban M.Hkes  
Pembina Tk I / IV b  
NIP: 19710219 200701 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Negara No.300 Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995  
Telepon (0621) 442133, laman serdangbedagaikab.go.id,  
Pos-el: dinkesperenc@gmail.com

Sei Rampah, 03 Juli 2025

Nomor : 18.12 / 440.441 / 1655 / VIII / 2025  
Lamp : -  
Perihal : **Selesai Penelitian**

Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor: 666/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 22 Maret  
2025, Perihal: Selesai Melakukan Penelitian :

Nama : ERISKA SUMITA  
NIM : 2103100046  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SERDANG BEDAGAI

Dengan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan bahwa telah  
selesai melaksanakan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai pada 15 April  
s/d 30 Mei 2025.

Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Serdang Bedagai

Boelian Dachban, M.HKes  
Pembina Tk I / IV b  
NIP: 19710219 200701 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/UK/BAN-PT/IAK.KP/PTXU/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fkip.umhu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nama lengkap : ERISKA SUMITA  
 NPM : 2103100016  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TAUFA ROKOK DI SERDANG BEDAGI

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	12 Desember 2024	Bimbingan Proposal Skripsi Bab I, II dan III	
2	14 Desember 2024	Bimbingan Revisi proposal Skripsi	
3	11 Januari 2025	Bimbingan Revisi Proposal Skripsi	
4	13 Januari 2025	ACC proposal skripsi	
5	16 Maret 2025	Bimbingan Draft Wawancara	
6	21 Maret 2025	ACC Draft Wawancara	
7	23 Juni 2025	Bimbingan skripsi Bab I, II, dan III	
8	04 Juli 2025	Bimbingan Skripsi Bab I, II, III, IV dan V	
9	11 Juli 2025	ACC Skripsi	

Medan, 29 Juli ..... 2025



Ketua Program Studi,  
 A.N.  
(A. NAWA MAHARKA, S.Sos, M.S.P.)  
 NIDN: 012118301

Pembimbing,  
(IDA MARTWELL, S.H, M.M.)  
 NIDN: 0008036102





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi & Pribersitas N, dengan Perpusakaan Nasional Republik Indonesia No. 04/1973/1973/1973  
Pusat Administrasi : Jalan Negeri Muhtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp. (061) 6622467  
NTP 0712010-000001 | Email: perpustakaan@umsu.ac.id | P4 perpustakaan@umsu.ac.id | perpustakaan@umsu.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 01959/KET/II.7-AU/UMSU-PM/2025



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : ERISKA SUMITA  
NPM : 2103100046  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Muharram 1447 H  
11 Juli 2025 M

  
Kepala Perpustakaan,  
Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

**JAPK**  
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan

**JAPK**

(JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

ISSN 2807-6729



JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA


**LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION**

**Dear Ms. Eriska Sumita**

Thank you for submitting a paper for **JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK)**, accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2033 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Serdang Berdagai"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, July 30, 2025

Editor In Chief

  
(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)  
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umstu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891



